

Peran UNAIDS Dalam Menangani Masalah HIV/AIDS Terhadap Perempuan di Afrika Selatan Pada Tahun 2011-2015

Ni Made Listu Ayu Belia Apsari¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, A.A. Ayu Intan Parameswari³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: listuayu@outlook.com¹⁾, rainypriadarsini@yahoo.com²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research is conducted with qualitative research method to compile how UNAIDS as an international organization tackling the problem of HIV/AIDS that effect women in South Africa. South Africa has the most people with HIV/AIDS in the world. The number of women who suffers from HIV/AIDS is higher compared to the number of male who is infected with HIV/AIDS. Women also suffers from the great impact of HIV/AIDS. UNAIDS as an international organization which works on HIV/AIDS field also highlighted the problem of HIV/AIDS against women. UNAIDS in its role as an actor has recommended a lot of policies to South Africa, which South Africa put the policies into action. Those policies has successfully make the HIV/AIDS prevalence number on women decreased.

Keywords: UNAIDS, International Organization, HIV/AIDS

1. PENDAHULUAN

Terdapat 42 juta orang yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS di bumi ini (UNAIDS,2002:2) dan 23 juta diantaranya terdapat di Benua Afrika (World Bank, 2005). Terdapat 5.024.000 jiwa terinfeksi penyakit HIV/AIDS di Afrika Selatan, dimana jumlah tersebut menjadikan Afrika Selatan sebagai negara dengan jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di dunia. Dari sekitar 5 juta jiwa, terdapat sekitar 2.500.000 perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS di Afrika Selatan (Dorrington,dkk.,2004:14). Adanya ketimpangan gender menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah penderita HIV/AIDS di negara tersebut (Shisana&Davis, 2004). Dalam bidang sosial dan ekonomi, perempuan lebih banyak bergantung terhadap laki-laki, sehingga menyebabkan perempuan tidak memiliki akses yang leluasa terhadap bidang kesehatan, ekonomi, dan

pendidikan.Dampak dari ketimpangan gender di Afrika diantaranya adalah: kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, serta tingginya jumlah perempuan pekerja seks komersial.

Dampak tersebut memiliki keterikatan satu sama lainnya. Banyaknya perempuan yang menjadi pekerja seks komersial diakibatkan oleh tingginya tingkat kemiskinan di negara tersebut. Collins dan Rau menyatakan bahwa mereka akan menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan perempuan yang masih bersekolah juga melakukan hal serupa, dengan harapan mendapatkan uang saku (FAO, 2004). Diskriminasi akan terjadi saat perempuan di Afrika Selatan mempublikasikan dirinya terkena HIV/AIDS. Hal ini tentunya akan berdampak pada timbulnya kekerasan fisik, hilangnya akses

ekonomi, serta adanya ancaman akan pengusiran dari rumah maupun lingkungan tempat tinggalnya (UNICEF,2000). Masa depan Afrika Selatan akan terancam apabila jumlah perempuan penderita HIV/AIDS terus meningkat, karena jumlah penularan HIV/AIDS melalui MTCT (*Mother to Children Transmission*) juga akan meningkat.

Richins dalam jurnalnya menyatakan bahwa sebuah negara berkembang masih membutuhkan bantuan asing dalam penanganan masalah HIV/AIDS dengan efektif (2008:142). UNAIDS merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh PBB yang memiliki tujuan untuk menangani masalah HIV/AIDS yang terjadi diseluruh dunia. Salah satu upaya UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS adalah melalui penanganan ketidaksetaraan gender. UNAIDS bekerja pada dua bagian, yaitu menjadi bagian dari sistem internasional dalam memformulasikan standar bagi ketidaksetaraan gender, serta membantu negara-negara anggota PBB dalam mengimplementasikan standar tersebut melalui technical dan financial support. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi anggota PBB yang juga mendapatkan bantuan dalam penanganan ketidaksetaraan gender yang menjadi salah satu alasan tingginya jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di negara tersebut.

2. KAJIAN PUSTAKA

Jurnal yang ditulis oleh Febrina Khairi yang berjudul Peran UNAIDS (*The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*) dalam penanganan HIV/AIDS di Zimbabwe,

dijelaskan bahwa Zimbabwe merupakan negara yang mendapatkan perhatian dari UNAIDS dalam penanganan kasus HIV/AIDS dikarenakan oleh tingkat penderitanya yang cukup tinggi dan keadaan ekonomi Zimbabwe yang sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dalam jurnal tersebut, Khairi mengutip dari Marzuki menyatakan bahwa peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena menduduki posisi tersebut. Khairi juga menyatakan bahwa UNAIDS bisa menjalankan perannya apabila diberikan kewenangan penuh dalam menjalankan sebuah permasalahan.

Khaira dalam jurnalnya menjelaskan peran UNAIDS melalui usaha-usaha yang dilakukan UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS yang ada di Zimbabwe, seperti menjalin kerjasama dengan *Global Fund*, membuat program ABC (*Abstain, Be faithful, Use Condom*), PMTCT (*Prevention From Mother to Child Transmission*). Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNAIDS, mencerminkan bahwa UNAIDS memiliki peran sebagai sebuah aktor. Zimbabwe yang merupakan negara berkembang, membutuhkan bantuan UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS yang ada di negaranya. UNAIDS memberikan bantuan dana maupun moril. Khairi menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh UNAIDS mampu menurunkan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di Zimbabwe.

Dalam jurnal yang ditulis Khaira tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan UNAIDS mencerminkan bahwa UNAIDS dalam bertugas dapat berperan sebagai

sebuah aktor. UNAIDS sebagai sebuah aktor artinya UNAIDS bisa bertidak sendiri sebagai sebuah entitas dan bukan lagi sebagai pelaksan kepentingan dari negara-negara yang ada di dalamnya. Dalam hal tersebut, UNAIDS melakukan upaya-upaya yang sudah disebutkan diatas untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu memberantas HIV/AIDS. Berbeda halnya dengan jurnal yang ditulis oleh Khaira, penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan peran UNAIDS sebagai sebuah aktor, dalam perannya memberikan rekomendasi kepada Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS di negara tersebut.

Ramjee dan Daniels dalam jurnal yang berjudul *Women and HIV in Sub-Saharan Afrika* menyatakan bahwa Sub-Saharan Afrika merupakan kawasan di Benua Afrika dan dunia yang memiliki jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di dunia. Dari jumlah penderita tersebut, jumlah penderita terbanyak merupakan perempuan. Dalam jurnal yang ditulisnya tersebut, Ramjee dan Daniels menyebutkan ada lima hal yang menyebabkan kerentanan perempuan terhadap penyakit HIV/AIDS, serta tiga hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS terhadap perempuan.

Kerentanan perempuan terhadap penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh lima hal, yaitu: faktor biologis, faktor variabilitas kontekstual dalam rasio seperti kegiatan seksual, faktor sosial dan ekonomi, faktor kerentanan berprilaku seperti tidak menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual, dan faktor terakhir adalah kerentanan struktural seperti ketidaksetaraan gender.

Tidak hanya menyebutkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan perempuan terhadap penyakit HIV/AIDS di Sub-Sahara Afrika, tetapi Ramjee dan Daniels juga menyertakan tiga intervensi yang bisa dilakukan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Sub-Sahara Afrika, yaitu: intervensi biomedikal, yaitu penggunaan obat-obatan seperti *anti-retroviral* (ARV), intervensi berprilaku seperti dengan melakukan koseling dan tes HIV, serta pendidikan, dan Intervensi ketiga adalah intervensi struktural, dimana intervensi struktural ini mencoba untuk mengubah norma sosial yang bisa memperburuk kerentanan perempuan terhadap HIV/AIDS. Dalam intervensi struktural ini, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, diantara adalah: *microfinance programs*, pendidikan, serta faktor dari kebijakan yang dibuat pemerintah yang menjadi faktor terbesar dalam penyebaran penyakit HIV/AIDS.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ramjee dan Daniels ini telah menyebutkan faktor-faktor penyebab kerentanan perempuan terhadap penyakit HIV/AIDS dan intervensi apa yang bisa dilakukan dalam penanganan masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Sub-Sahara Afrika. Dalam tulisan ini, penulis menyebutkan faktor-faktor penyebab tingginya jumlah perempuan penderita HIV/AIDS di Afrika Selatan, dimana Afrika Selatan termasuk kedalam salah satu negara yang tergabung dalam kawasan Sub-Sahara Afrika. Penulis kemudian menjelaskan peran UNAIDS sebagai seorang aktor dalam penanganan masalah HIV/AIDS di Afrika Selatan, yaitu UNAIDS memberikan rekomendasi- rekomendasi yang bisa

dijadikan sebuah kebijakan dan dasar bagi pemerintah Afrika Selatan dalam penanganan masalah HIV/AIDS di Afrika Selatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Borgdan dan Biklen merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku orang yang diamati (Rahmat, 2009:2). Penelitian ini terjabar dalam bentuk deskriptif mengenai peran UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Afrika Selatan. Penelitian ini mengambil sumber data dari jurnal, dokumen organisasi, dokumen pemerintah, serta artikel yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Organisasi internasional merupakan unit analisis yang digunakan pada penelitian ini. Organisasi digunakan sebagai unit analisis karena penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran dari organisasi internasional, yaitu UNAIDS sebagai sebuah aktor.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder, dimana data-data yang diambil berasal dari jurnal ilmiah serta dokumen-dokumeen yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang relevan dikumpulkan dan disusun untuk dijadikan sebagai bahan analisis dari penelitian ini.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses analisa penelitian kualitatif, yaitu tahap reduksi data, dimana dalam tahap ini penulis

merangkum dan memilih data yang dianggap penting dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis menyajikan data-data yang ada dengan uraian singkat yang memiliki hubungan antara uraian satu dan uraian lainnya. Penggunaan gambar, tabel, dan diagram akan digunakan untuk lebih menjelaskan uraian maupun data yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai tahap terakhir penelitian, dimana kesimpulan ditarik dari uraian dan data yang ada, yang kemudian dikaitkan dnegan konsep dan teori yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HIV/AIDS dan Perempuan di Afrika Selatan

HIV/AIDS menjadi masalah kesehatan publik tertinggi di Afrika Selatan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kematian yang ada di Afrika Selatan. 38% dari jumlah kematian tersebut berasal dari penderita HIV/AIDS (Benatar,2004). Terdapat sekitar 5 juta penduduk Afrika Selatan yang terinfeksi HIV/AIDS dan sekitar 2,5juta diantaranya adalah perempuan (Dorrington, dkk., 2004:14).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penderita HIV/AIDS perempuan di Afrika Selatan, diantaranya adalah:

- Kemiskinan

Sebanyak 52% dari jumlah penduduk Afrika Selatan tinggal dibawah garis kemiskinan, dimana orang yang hidup dalam kemiskinan yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan makanan yang seimbang

akan lebih mudah terkena infeksi HIV/AIDS (Pacsa, 2004). Menurut Collins dan Rau, disaat perempuan tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya, banyak perempuan akan menjadi pekerja seks komersial (FAO, 2001). Banyak perempuan yang juga memiliki peran sebagai ibu yang terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang demi menghidupi keluarga dan anak-anak mereka. Tidak hanya perempuan yang memiliki peran sebagai ibu saja, tetapi perempuan muda juga melakukan hal serupa, demi mendapatkan uang bekal dan hadiah-hadiah. Perempuan yang memiliki status sosial yang rendah di masyarakat, serta tidak memiliki otonomi ekonomi, dan hanya bergantung pada partnernya atau suaminya dalam hal finansial menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali atau bahkan bernegosiasi untuk menggunakan kondom dalam kegiatan seksual (Kim dan Watts, 2005). Kegiatan seksual yang didasari oleh kemiskinan, akan meningkatkan resiko adanya kegiatan seksual yang tidak aman (FAO, 2001), dan kekerasan seksual serta fisik (Kim dan Watts, 2005). Hal tersebut tentunya meningkatkan kerentanan perempuan terkena penyakit HIV/AIDS.

- Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender menempatkan perempuan pada posisi riskan dalam penyebaran penyakit HIV/AIDS. Hal ini terjadi dalam tiga mekanisme, yaitu: adanya kemungkinan untuk terjadinya penularan secara langsung melalui hubungan seksual

yang dipaksakan, trauma yang berasal dari kekerasan yang bisa berimbas pada tingkah laku seksual, kekerasan bisa membatasi kemampuan perempuan dalam menerapkan hubungan seksual yang aman dan bisa menghalangi perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang terkait HIV/AIDS (Amdie, 2005). Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat kekerasan dan pemerkosaan tertinggi di dunia (Onyejekwe,2004). Artz menyatakan bahwa minimnya kesempatan yang dimiliki perempuan dalam mengakses perekonomian bisa membatasi perempuan dalam mengakses obat antiretroviral, kondom wanita, dan microticides. Hal tersebut akan mengekspos perempuan di Afrika Selatan kepada kekerasan yang lebih besar lagi (Onyejekwe, 2004).

- Pendidikan

UNICEF dalam situsnya menyatakan bahwa perempuan dengan usia 15-24 tahun memiliki resiko dua kali lebih besar untuk terkena penyakit HIV/AIDS dibandingkan dengan laki- laki. Dengan adanya resiko dua kali lebih, besar tentunya ada efek dari hal tersebut, yaitu: perempuan dengan HIV/AIDS tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dibandingkan dengan laki-laki, beban untuk merawat anggota keluarga biasanya akan dilakukan oleh perempuan dan hal tersebut bisa mengakibatkan perempuan untuk berhenti sekolah, HIV/AIDS mengancam dampak positif dari pendidikan dasar dan mempengaruhi tingkat masuk sekolah dasar perempuan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, yatim piatu karena

HIV/AIDS, dan penderita HIV/AIDS, kadang-kadang ditolak aksesnya untuk mendapatkan pendidikan. Banyak dari anak-anak tersebut tidak bisa pergi sekolah karena mereka harus merawat orang tua dan saudaranya yang terkena penyakit HIV/AIDS. Sekitar 12 juta anak-anak sudah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena HIV/AIDS. Anak-anak tersebut tentunya akan sulit untuk mendapatkan pendidikan dan bisa cepat terjebak dalam lingkungan kerja yang bersifat eksploitatif (UNGEI, 2005).

UNAIDS di Afrika Selatan

Kemiskinan, sistem kesehatan yang masih belum berkembang dengan baik, serta infrastruktur yang juga masih belum memadai, sudah pasti Afrika tidak akan bisa untuk menangani masalah HIV/AIDS dengan cepat dan baik, sebagaimana yang seharusnya dilakukan, apabila benua Afrika memutuskan untuk melakukannya dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki (Goliber, 2002). Bantuan keuangan dan teknis dari komunitas internasional merupakan sebuah kunci dalam menangani masalah HIV/AIDS yang ada di Afrika. PBB sebagai sebuah badan internasional, kemudian membentuk sebuah kerjasama yang diberi nama IPAA (*International Partnership Against AIDS in Africa*), yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang ada di Afrika dalam menangani masalah HIV/AIDS. IPAA merupakan sebuah kerjasama yang terdiri dari pemerintah negara-negara Afrika, badan PBB, donor, serta sektor privat dan komunitas (UNAIDS, 2001).

Setelah UNAIDS terbentuk, UNAIDS kemudian menempatkan sekretariatnya di Afrika Selatan. Sekretariat UNAIDS yang berada di Afrika Selatan mendukung upaya pemerintah Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS dengan cara bekerja sama dengan pemerintah, komunitas sosial, dan sektor bisnis. Sekretariat UNAIDS yang berada di Afrika Selatan didukung oleh penasihat pengawas dan evaluasi, penasihat kerjasama, dan sebuah staff pendukung lainnya..

Sekretariat UNAIDS mengkoordinasi dan memfasilitasi upaya dari *United Nations Theme Group on AIDS* yang bekerja melalui joint *UN Team on AIDS* (UNAIDS dan kosponsors), mendukung partner lokal di seluruh bagian Afrika Selatan dengan cara memberikan bantuan teknis dalam perencanaan program, pengimplementasian, penyebarluasan, dan pengevaluasian Dukungan yang diberikan antara lain:

- Kepemimpinan dan advokasi untuk mengatasi epidemi AIDS secara lebih efektif
- Informasi strategis untuk membimbing upaya dalam menangani AIDS
- Mengikuti, mengamati, dan mengevaluasi dari epidemi AIDS dan meresponnya
- Pengembangan masyarakat sipil dan pengembangan kerjasama
- Mobilisasi sumber daya untuk mendukung respon yang efektif.

Level Kerja UNAIDS

UNAIDS dalam *Governance Handbook* menyebutkan bahwa UNAIDS bekerja dalam dua level, yaitu level global dan level negara

(2011:84). Pada level global, UNAIDS akan memberikan dukungan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan strategi, bantuan teknis, penelitian dan pengembangan, advokasi dan hubungan-hubungan luar. UNAIDS juga mendukung organisasi-organisasi lainnya yang bekerja dalam penanggulangan masalah HIV/AIDS dalam beberapa area, seperti perencanaan sosial dan ekonomi, populasi, budaya, pendidikan, kesehatan, pengembangan komunitas dan pergerakan sosial, kesehatan seksual dan reproduksi, serta perempuan dan remaja.

Dalam *governance book* yang dikeluarkan oleh UNAIDS, disebutkan bahwa di sebuah negara, pemerintah dari negara tersebut merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam penanganan masalah HIV/AIDS di negara masing-masing. Dalam hal ini, UNAIDS akan melengkapi dan mendukung upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam menangani masalah HIV/AIDS. Organisasi yang bergabung dalam cosponsor pun sebaiknya memasukkan hal-hal normatif yang dilakukan oleh UNAIDS pada level global, seperti kebijakan, strategi, dan hal-hal teknis kedalam program-program yang dijalankan pada negara tersebut, yang berhubungan dengan penanggulangan masalah HIV/AIDS, konsisten dengan rencana dan prioritas pada tingkat nasional sesuai dengan yang dibutuhkan (2011:38). Sebuah fungsi penting dari UNAIDS dalam tingkat negara adalah untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan dan memonitor dari seluruh program yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS (2011:38).

Peran UNAIDS Dalam Menangani Masalah HIV/AIDS Terhadap Perempuan di Afrika Selatan

Penelitian ini melihat peran UNAIDS sebagai sebuah aktor dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Afrika Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Afrika Selatan digunakan untuk melihat peran UNAIDS sebagai sebuah aktor. Menurut Haftel dan Thompson, adanya sekretariat merupakan salah satu ciri dari keindependenan sebuah organisasi internasional dalam menjalankan perannya sebagai sebuah aktor (2006). Dalam menjalankan tugas yang dimilikinya, sekretariat dapat merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu negara, dengan berdasarkan kepada visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut (Haftel&Thompson, 2006).

UNAIDS dalam menjalankan tugasnya di Afrika Selatan, telah melakukan beberapa upaya dalam menangani masalah HIV/AIDS yang ada di negara tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan UNAIDS ini merupakan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dijalankan dan diimplementasikan oleh Afrika Selatan pada kebijakan kesehatan Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di negara tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNAIDS diantaranya adalah:

1. *High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality, and HIV*

Badan khusus tersebut akan ikut serta dalam advokasi politik tingkat tinggi dalam mendukung negara-negara di Afrika bagian timur dan selatan dalam mempercepat upaya-upaya di negara tersebut dan memonitor implementasi dari *Windhoek Declaration for Women, Girls, Gender Equality and HIV*. Badan tersebut mengarahkan upaya-upaya yang akan dilakukan agar dapat memberdayakan perempuan, serta mendorong pemerintah untuk mengupayakan perkembangan kebijakan yang positif, dan implementasi dari keadaan hukum yang melindungi perempuan.

Departemen perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas Afrika Selatan mengundang badan tersebut untuk membicarakan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Afrika Selatan mengenai permasalahan kritis yang dihadapi perempuan dan anak-anak, diantaranya adalah kehamilan remaja, kekerasan yang berdasar pada gender, transmisi HIV/AIDS dari ibu ke anak, serta pekerja seks komersial. Wakil Menteri dari departemen perempuan, anak-anak dan orang dengan disabilitas Afrika Selatan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh badan taskforce akan membantu Afrika Selatan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan-hambatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan dan anak-anak, sehingga Afrika Selatan akan dapat membuat program yang lebih efektif dalam menangani masalah tersebut.

Badan *High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality, and HIV*

(HLTF) menyatakan bahwa Afrika Selatan memiliki badan legislatif, kebijakan, dan struktur organisasi yang dibutuhkan dalam menangani masalah HIV/AIDS yang ada di negara tersebut. Badan tersebut juga menyatakan bahwa sekarang Afrika harus fokus pada isu-isu transformasi sosial dan perubahan pada tingkah laku dan kepercayaan individu terhadap HIV/AIDS. Badan HLTF membuat rekomendasi dengan proposal yang berisi delapan action plan yang akan melibatkan pemerintah Afrika Selatan, diantaranya adalah *Departement of Women, Children, and People with Disabilities (DWCPWD)* dengan komisi *Gender Equality, Departement of Education Helath, Social Development, Police Services, Justice & Constitutional Development, Local Government dan the Presidency*. Kedelapan action plans tersebut diantaranya adalah:

- Mengidentifikasi '*community gateways*' untuk mobilitas dan aksi komunitas yang lebih terakselerasi
- Membuat kepemimpinan multi-sektor tentang kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR)
- Menerapkan sanksi dan memperkuat akuntabilitas sektoral pada SRHR
- Penghargaan kepemimpinan yang protektif dan perilaku institusional
- Menyelenggarakan KTT tahunan mengenai 'Promosi dan Melindungi Hak Perempuan di Afrika Selatan
- Meninjau kembali undang-undang, menutup kesenjangan badan legislatif yang ada, serta mempercepat pembuatan undang-undang yang tertunda
- Meningkatkan pendanaan, kapasitas, dan otoritas DWCPD

• Meningkatkan pendanaan untuk perempuan, laki-laki, dan kaum minoritas

b. *Empower young women and adolescent girls: Fast-Tracking the end of the AIDS epidemic in Africa*

Ini merupakan sebuah laporan yang menjadi upaya bersama yang dilakukan oleh UNAIDS dan Uni Afrika dalam menangani masalah perempuan dan HIV/AIDS di Benua Afrika, termasuk Afrika Selatan. UNAIDS dan Uni Afrika merilis laporan ini dengan tujuan sebagai pembimbing bagi kawasan regional dan advokasi global, serta memberikan informasi mengenai pencegahan dan perawatan HIV/AIDS terhadap perempuan. Laporan ini menyatakan bahwa ada tiga komitmen politik yang bisa mempercepat pemenuhan hak-hak dan empowerment dari perempuan Afrika untuk membantu penanganan masalah HIV/AIDS yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan keadilan sosial (UNAIDS, 2015). Ketiga komitmen politik tersebut diantaranya adalah: menghentikan infeksi baru HIV/AIDS pada perempuan dalam usia produktif untuk memastikan bahwa HIV/AIDS tidak lagi menjadi penyebab utama dari tingginya angka kematian perempuan usia produktif, memberikan *empowerment* kepada perempuan melalui pendidikan seksual yang komprehensif, serta menghindari penularan HIV/AIDS terhadap anak-anak dan menjaga agar ibu mereka yang terinfeksi HIV/AIDS bisa tetap hidup.

Bagian ketiga dari laporan ini menuliskan ada lima strategi yang bisa dilakukan dalam menangani masalah

HIV/AIDS terhadap perempuan, diantaranya adalah:

1. Agen kolektif perempuan, partisipasi, dan kepemimpinan.
2. Strategi untuk menurunkan kekerasan terhadap partner seksual, dan tingkat kerapuhan mereka terhadap HIV/AIDS
3. Meningkatkan proteksi sosial dan cash transfers untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerapuhan perempuan terhadap penyakit HIV/AIDS. Afrika Selatan merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang mengimplementasikan program ini.
4. Strategi untuk mempertahankan perempuan mendapatkan pendidikannya dan pendidikan seksual yang komprehensif.
5. Meningkatkan dan mengintegrasikan HIV/AIDS dengan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi

c. Deklarasi Politik

Deklarasi politik merupakan sebuah janji maupun kesepakatan yang dibuat oleh UNAIDS dan negara-negara anggota PBB dalam menangani masalah HIV/AIDS yang terjadi di semua belahan dunia. Melalui UN High Level Meeting on HIV/AIDS, deklarasi politik tersebut diperbaharui setiap lima tahun sekali. Deklarasi politik digunakan UNAIDS sebagai landasan untuk membuat strategi yang akan digunakan dalam menangani masalah HIV/AIDS di berbagai belahan dunia, termasuk Afrika Selatan. Hal-hal yang dibahas dalam deklarasi politik tersebut, tidak hanya masalah yang timbul dari sisi kesehatan saja, melainkan juga membahas mengenai permasalahan ketidaksetaraan gender, ekonomi, dan hal lainnya yang muncul sebagai efek maupun sumber dari

HIV/AIDS. Negara-negara anggota PBB kemudian diharapkan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan dalam menangani masalah HIV/AIDS di negaranya melalui deklarasi politik tersebut maupun strategi yang digunakan oleh UNAIDS.

Afrika Selatan merupakan negara yang mengadopsi deklarasi politik tersebut dan strategi UNAIDS kedalam kebijakan negaranya. Hal tersebut tertuang dalam NSP (*National Strategic Policies*) atau strategi kebijakan nasional Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS. Dalam NSP tersebut, menangani masalah ketidaksetaraan gender dan masalah HIV/AIDS terhadap perempuan menjadi salah satu upaya Pemerintah Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS di negara tersebut. Dalam NSP tersebut disebutkan bahwa untuk mengeliminasi ketidaksetaraan gender merupakan target area prioritas bagi Afrika Selatan, serta NSP sebagai landasan bagi Pemerintah Afrika Selatan juga membahas mengenai hal tersebut.

Dalam laporan yang dirilis oleh SANAC (*South African National AIDS Council*), menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Afrika Selatan dalam menangani masalah ketidaksetaraan gender, yaitu Pemerintah Afrika Selatan melalui *Department of Social Development* (DSD) mengeluarkan program proteksi sosial, dimana 85% penerima keuntungan dari program tersebut adalah perempuan. Pemerintah Afrika Selatan melalui DSD dan badan pemerintah lainnya yang bergerak dalam bidang keadilan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, layanan

masyarakat, keselamatan dan keamanan, pemerintah lokal, serta urusan dalam negeri, menjalankan *Thutuzela Care Center* (TCC), yang beroperasi di rumah sakit dimana terdapat tingginya tingkat pemerkosaan di sebuah daerah. DSD juga membentuk *Hlayisani White Door Centre of Hope* di Provinsi Mpumalanga yang bertujuan sebagai tempat perlindungan sementara bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan. Pada tahun 2012, Kementerian Perempuan, Anak-anak dan Orang-orang dengan Disabilitas (DWCPD) Afrika Selatan menginisiasi pembuatan undang-undang mengenai *Women Empowerment and Gender Equality* (WEGE). Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan akses perempuan terhadap perawatan kesehatan dasar, dan yang paling penting terhadap kesehatan dan hak sistem reproduksi seksual. (SANAC, 2016).

Pemerintah Afrika Selatan berkomitmen untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender di Afrika Selatan dengan membuat agenda nasional dengan lima prioritas, yaitu:

- membuat lapangan pekerjaan, pekerjaan layak, dan penghidupan berkelanjutan bagi perempuan, termasuk mekanisme pendanaan untuk meningkatkan peluang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan
- pendidikan untuk perempuan dengan fokus pada bidang sains dan teknologi
- kesehatan pada perempuan, terutama penurunan angka kematian pada ibu dan bayi, serta dampak negatif HIV/AIDS pada perempuan
- mengatasi kekerasan berbasis gender

- pengembangan perempuan di pedesaan, perubahan lahan, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan untuk perempuan

Dari kelima prioritas yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Afrika Selatan tersebut beberapa yang sudah dijalankan pemerintah, diantaranya adalah program Mom-Connect, cash transfers program untuk perempuan, serta program DREAMS (*Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored, and Safe*).

Tidak hanya membuat kebijakan saja, Pemerintah Afrika Selatan juga bekerja sama dengan organisasi laki-laki dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. *Brothers for Live* merupakan salah satu organisasi yang melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. (SANAC, 2016).

Tantangan yang Dihadapi Oleh UNAIDS

Kesetaraan gender merupakan penyebab utama tingginya masalah HIV/AIDS di negara Afrika Selatan. UNAIDS sebagai organisasi internasional yang menangani masalah tersebut, juga memasukkan unsur kesetaraan gender dalam menangani masalah HIV/AIDS di Afrika Selatan.

Berbagai upaya telah dilakukan UNAIDS dalam menangani masalah tersebut, seperti pembentukan badan *Task Force*, melalui pembuatan laporan- laporan, serta melalui pembuatan deklarasi politik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNAIDS ini, kebanyakan menargetkan perempuan sebagai gender yang memiliki tingkat

penderita HIV/AIDS tertinggi di negara tersebut.

Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, UNAIDS tentunya mengalami tantangan sehingga upaya yang dilakukan tidak terlalu berjalan dengan efektif. Tantangan terbesar yang dialami oleh UNAIDS dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di Afrika Selatan adalah pada bidang sosial dan kultur. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UNAIDS adalah belum meratanya pemahaman masyarakat Afrika Selatan terhadap konsep kesetaraan gender dan peran gender dalam masyarakat di Afrika Selatan. Afrika Selatan masih berpikir bahwa laki-laki memiliki posisi tertinggi dalam tingkatan masyarakat sosial di negara tersebut. Tingkatan remaja merupakan tingkatan yang kritis dalam pengembangan informasi. Remaja Afrika Selatan termasuk dalam remaja yang konservatif dalam membahas mengenai gender di negara tersebut, mereka masih beranggapan bahwa oleh karena itu, banyaknya tingkat HIV/AIDS baru terjadi pada tingkatan umur remaja (UNICEF, 2012).

Terdapat beberapa norma sosial yang ada di Afrika Selatan mengenai laki-laki yang tidak bias dihilangkan dengan mudah, yaitu: laki-laki merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban dalam mencari nafkah, laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri, dst. Bukan merupakan pekerjaan mudah bagi UNAIDS dalam mengubah pemikiran dan norma-norma sosial yang sudah ada sejak lama di Afrika Selatan.

4. KESIMPULAN

UNAIDS merupakan badan bentukan PBB yang bertugas dalam menangani masalah HIV/AIDS di berbagai belahan dunia. UNAIDS terdiri dari sebelas badan PBB lainnya, atau yang disebut dengan co-sponsors. Kesebelas co-sponsors tersebut ditunjuk untuk masuk dalam UNAIDS untuk menangani HIV/AIDS yang lebih efektif, karena dampak maupun penyebab dari penyakit HIV/AIDS tersebut tidak hanya berasal dari aspek kesehatan saja, seperti aspek pendidikan, sosial budaya, serta ekonomi. Dalam penanganan HIV/AIDS di berbagai negara, UNAIDS bekerja melalui *country office* maupun *regional country office*. Di Afrika Selatan, UNAIDS bekerja melalui *regional country office* yang terletak di Afrika Selatan.

UNAIDS dalam menangani masalah terhadap perempuan yang terjangkit HIV/AIDS telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah dengan membentuk badan *High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality and HIV for Eastern and Southern Africa*, membuat laporan *Fast Tracking the AIDS response for young and adolescent girls in Africa*, serta melalui pembuatan deklarasi politik. Melalui dibentuknya badan *High Level Task Force on Women, Girls, Gender Equality and HIV for Eastern and Southern Africa*, UNAIDS memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa diaplikasikan oleh Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS di negara tersebut. UNAIDS mengevaluasi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di negara tersebut,

Afrika Selatan melalui DWCPWD (*Department of Women, Children, and People With Disabilites*) menerima rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh UNAIDS dan mencoba untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut kedalam kebijakan Afrika Selatan.

Laporan *Fast Tracking the AIDS response for young and adolescent girl in Africa* merupakan upaya kedua yang dilakukan oleh UNAIDS. Laporan ini dibuat untuk melihat upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Afrika, termasuk Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan yang ada di negara tersebut. Tidak hanya berisi mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh negara-negara Afrika dan Afrika Selatan, tetapi UNAIDS juga memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan.

Upaya ketiga yang dilakukan oleh UNAIDS adalah melalui deklarasi politik. Deklarasi politik merupakan sebuah deklarasi yang diperbaharui oleh UNAIDS dan negara-negara di dunia ini setiap lima tahun sekali. Melalui deklarasi politik ini, UNAIDS bisa menentukan strategi apa yang harus dilakukan, serta bagian-bagian apa saja yang harus menjadi perhatian bagi UNAIDS dalam melaksanakan tugasnya.

Meskipun UNAIDS sudah menjalankan peran dan fungsinya di Afrika Selatan dalam menangani masalah HIV/AIDS terhadap perempuan di negara tersebut, upaya-upaya yang dikeluarkan oleh UNAIDS sudah cukup bekerja secara maksimal. Hal ini dapat dilihat

dari jumlah penderita baru HIV/AIDS dengan jenis kelamin perempuan setiap tahunnya terus menurun meskipun tidak signifikan. Namun, dalam menjalankan upaya-upayanya, UNAIDS juga mendapatkan halangan, dimana salah satu halangan yang dialami oleh UNAIDS adalah adanya norma sosial dan budaya di Afrika Selatan yang sudah ada sejak lama dan tidak bisa dirubah dengan mudah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Archer, Clive. (2001). *International Organizations*. New York: Routledge.

Jurnal

Amdie, G. (2005). *Gender based violence & the risk of HIV infection among women attending voluntary counselling and testing services in Addis Ababa. Ethiopia: Addis Ababa University. (MA Thesis)*. diakses pada 5 Januari 2018 dari <http://socialwork.journals.ac.za/pub/article/view/455>

Benatar, S. R. (2004). *Health Care Reform and the Crisis of HIV and AIDS in South Africa. The New England Journal of Medicine*, 351(1), 81-92. diakses pada 10 Januari 2018, dari <http://dx.doi.org/10.1056/NEJMhpr033471>

Derrick, Deborah. (2014). *Empowering Women and Girls: The Impact of Gender Equality on Public Health. The Lancet Global Health Blog* (sumber elektronik). diakses pada 15 Oktober 2017, dari <http://globalhealth.thelancet.com/2014/08/08/empowering-women-and-girls-impact-gender-equality-public-health>

Dorrington, dkk. (2004). *The Demographic Impact of HIV/AIDS in South Africa: National Indicators for 2004*. diakses pada 25 Agustus 2017, dari

<http://www.mrc.ac.za/bod/demographic.pdf>

FAO. (2004). *Underlying causes of HIV/AIDS*. diakses pada 1 September 2017, dari <http://www.fao.org/wairdocs/ad696e/ad696e04.htm>

Fischer, Peter. (2011). *International Organizations: Structure and Case Studies*. diakses pada 10 Oktober 2017, dari http://paneuro.uni.cz/files/sk/fp/ulohy-studentov/2rocnikbc/io_skript-2011.pdf

Gupta, Geeta Rao. (2000). *Approaches for Empowering Women in the HIV/AIDS Pandemic: a gender perspective*. diakses pada 25 September 2017, dari <http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/hivaids/Gupta.html>

Haftel, Y. Z., & Thompson, A. (2006). *The Independence of International Organizations: Concept and Applications. Journal of Conflict Resolution*, 50(2), 253-275. Diakses pada 15 Maret 2018 dari <https://doi.org/10.1177/0022002705285288>

Khairi, Febrina. (2015). Peran UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) dalam penanganan HIV/AIDS di Zimbabwe. *JOM FISIP*, 2(2). diakses pada 5 September 2017, dari <https://media.neliti.com/media/publications/32282-ID-peran-unaid-the-joint-united-nations-programme-on-hivaids-dalam-penanganan-hiva.pdf>

Kim, JC; Watts, CH. (2005) *Gaining a foothold: tackling povertgender inequality, and HIV in Africa*. *BMJ*, 331 (7519). pp. 769-72. Diakses pada 20 Juni 2018 dari <http://researchonline.lshtm.ac.uk/12515/>

Leburu, Goitseone & Phetlho-Thekisho, Nomonde. (2015). *Reviewing gender-based violence against women and HIV/AIDS as intersecting issues. Social Work/Maatskaplike Werk*. 51.

- 10.15270/51-3-455. diakses pada 20 Juni 2018 dari https://www.researchgate.net/publication/283196389_Reviewing_gender-based_violence_against_women_and_HIVAIDS_as_intersecting_issues
- Norton. (2009). *Gender Inequality*. diakses pada 5 Oktober 2017, dari <https://www.ssc.wisc.edu/~wright/ContemporaryAmericanSociety/Chapter%2015%20--%20Gender%20inequality%20--%20Norton%20August.pdf>
- Onyejekwe, C. J. (2005), *Women, War, Peace-building and Reconstruction International Social Science Journal*, 57: 277-283. diakses pada 20 Juni 2018 dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2451.2005.550.x#>
- Ramjee, Gita & Daniels, Brodie. (2013). *Women and HIV in sub-Saharan Africa. AIDS research and therapy*. 10. 30. 10.1186/1742-6405-10-30. Diakses pada 7 Juli 2018 dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330537>
- Richins, Christopher. (2008). *The Impact of International Organizations on the AIDS Epidemic in Sub-Saharan Africa. Journal of International Business and Law*, 7(1). diakses pada 3 September 2017, dari <http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=jibl>
- Situs Website**
- Facts About UNAIDS*, 1996. diakses pada 15 Maret 2018 dari http://data.unaids.org/publications/irc-pub03/una96-2_en.pdf
- High-Level Taskforce for women, girls and HIV calls for accelerated efforts to protect the rights and wellbeing of young women and girls in South Africa*, 2012. Diakses pada 8 April 2018 dari <http://www.unaids.org/en/resources/presscent/re/featurestories/2012/october/20121031sataskforce>
- Jewkes, Rachel. (2012). *A South African Perspective on Gender Inequality, Violence, Sexual Health and HIV*. [online] UNICEF- IRC. diakses 10 Januari 2019 dari <https://www.unicef-irc.org/article/917-a-south-african-perspective-on-gender-inequality-violence-sexual-health-and-hiv.html>
- National Strategic Plan for HIV and AIDS, STIs and TB, 2012-2016*. diakses pada 22 April 2018 dari https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/site/s/default/files/resources/South_Africa_2012_2016_National_strategic_plan.pdf
- UNAIDS. (2009). *Operational Plan for UNAIDS Action Framework: addressing women, girls, gender equality and HIV, AIDS*. diakses pada 10 Juni 2018 dari http://data.unaids.org/pub/report/2009/jc1794_action_framework_gender_equality_en.pdf
- SANAC. (2016). *Republic of South Africa 2016 Global Aids Response Progress Report (Quantitative Report)*. diakses pada 10 Juni 2018 dari http://sanac.org.za/wp-content/uploads/2018/03/MandE-SANAC-Global-AIDS-Response-Progress-Report_2016.pdf
- Ten targets: 2011 United Nations Political Declaration on HIV and AIDS*. (n.d.) unaids.org: sumber elektronik. diakses pada 10 Juni 2018 dari www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20160318_ten_targets_en.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id
- UN News Centre. (n.d). .un.org: Sumber elektronik. Diakses 22 Agustus, 2017, dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34977#.WgosXWiCziW>
- United Nations Population Fund*. (n.d.) unfpa.org: sumber elektronik. diakses pada 20 Oktober 2017, dari <https://www.unfpa.org/resources/freque>

ently- asked-questions-about-gender-equality

UNAIDS Governance Book. (n.d.) unaid.org: sumber elektronik. diakses pada 10 Juni 2018 dari www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC1682_GovernanceHandbook_March2011_en.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id

UNAIDS 2011 Political Declaration. (n.d.) unaid.org: sumber elektronik. diakses pada 10 Mei 2018 dari www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/20110610_UN_A-RES-65277_en.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id

UNAIDS 2011-2015 Strategy: Getting to Zero. (n.d.) unaid.org: sumber elektronik.

diakses pada 24 April 2018 dari www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2034_UNAIDS_Strategy_en.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=id

World Bank. (n.d.) siteresources.worldbank.org: sumber elektronik. diakses pada 24 Agustus 2017, dari <http://siteresources.worldbank.org/EXTABOU/TUS/Resources/GenderAIDS.pdf>

World Health Organization. (n.d.). [who.int](http://www.who.int): sumber elektronik. diakses pada 1 Oktober 2017, dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/en/>